

AGUS  
DERMAWAN

KUN  
PRASENO



18 OKTOBER 2011

SEBUAH **PROGRAM KKP UNTUK WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**  
DIPERSEMBARKAN OLEH **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI** DAN **USAID-IMACS**  
PADA **DISKUSI REGIONAL FORUM KTI** TEMA **ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM UNTUK**  
**PULAU-PULAU KECIL DI KAWASAN TIMUR INDONESIA** TEMPAT **THE SANTOSA LOMBOK**



**DM DEVELOPMENT**  
**MARKETPLACE**

# MENJANGKAU ORANG-ORANG TERLUAR: PROGRAM KKP UNTUK WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

IR. AGUS DERMAWAN, MSi  
Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Mataram, Oktober 2011**

# OUTLINE

- LATAR BELAKANG
- PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PULAU-PULAU KECIL
  - ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
  - STRATEGI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
  - PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT)
  - PROGRAM AKSI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL



# LATAR BELAKANG

- ❑ Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 13.487 pulau (Hasil verifikasi Tim Perpres 112/2006 (2011), dimana sebagian besar merupakan PPK dg luas < 2000 km<sup>2</sup>)
- ❑ Sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir (326 dari 498 kab/Kota di Indonesia merupakan daerah pesisir (2010);
- ❑ Sebagian besar wilayah PPK masih terisolir sehingga belum banyak tersentuh kebijakan dan program Pemerintah
- ❑ Untuk itu, perlu dilakukan strategi dan kebijakan yang dapat menjangkau masyarakat di PPK sehingga secara ekonomi dan ekologi menjadi lebih berdaya



# Karakteristik Biogeofisik Pulau2 Kecil

- Terpisah dari pulau induk (*mainland*) sehingga bersifat insular;
- Tidak mempunyai *hinterland* yang jauh dari pantai;
- Tidak mampu mempengaruhi hidroklimat laut;
- Daerah tangkapan air (*catchment area*) kecil;
- Rentan terhadap perubahan lingkungan, aktivitas manusia dan bencana alam;
- Keterbatasan sumber air tawar, daerah tangkapan air dan tanaman pangan;
- Eksistensi pulau kecil dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun.
- Sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, baik akibat alam maupun ulah manusia.



# Karakteristik Pulau2 Kecil

- Habitat/ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi dibanding proporsi ukuran pulaunya.
- Memiliki resiko lingkungan yang tinggi, misalnya akibat pencemaran dan kerusakan, aktivitas transportasi laut dan aktivitas penangkapan ikan, bencana alam dan sebagainya.
- Keterbatasan daya dukung (*carrying capacity*) pulau, seperti ketersediaan air tawar, *catchment area* dan tanaman pangan.
- Melimpahnya biodiversitas laut.



# DAMPAK PERUBAHAN IKLIM THD WILAYAH PULAU-PULAU KECIL

- ❑ Peningkatan permukaan air laut (sea level rise) akan memacu laju erosi pantai; meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir (rob); meluasnya intrusi air laut, dan mengancam eksistensi daratan pulau-pulau kecil
- ❑ Pada tahun 2100 diperkirakan sekitar 48 pulau di Indonesia akan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut (Susandi, 2008)
- ❑ Peningkatan permukaan air laut akan meningkatkan salinitas di wilayah perairan pesisir sehingga mengancam keberadaan ekosistem pesisir khususnya ekosistem pasang surut seperti hutan mangrove
- ❑ Peningkatan suhu permukaan air laut akan menyebabkan pemutihan terumbu karang (*coral reef bleaching*) dan akan berdampak pada degradasi terumbu karang



# BEBERAPA PERMASALAHAN DI PULAU2 KECIL



Pencemaran limbah



sanitasi lingkungan



abrasi pantai



penyediaan air bersih



prasarana jalan



# PERUSAKAN DI PULAU KECIL



PENAMBANGAN KARANG UTK BANGUNAN



PERUSAKAN MANGROVE UTK PEMUKIMAN



KERUSAKAN KARANG AKIBAT BOM



PENCEMARAN SAMPAH DI PANTAI

# SU DAN PROBLEM PULAU2 KECIL

- Kemiskinan masyarakat;
- Keterbatasan sumberdaya manusia;
- Keterbatasan sarana dan prasarana;
- Potensi pengembangan ekonomi belum dikelola secara optimal;
- Keterbatasan akses transportasi dan komunikasi;
- Keterbatasan anggaran pembangunan (APBN/APBD); sedangkan biaya pembangunan di PPK tinggi;
- Pada umumnya terisolir dan jauh dari pulau induk;
- Wilayah perbatasan dan PPKT belum tertangani dengan baik;
- Keterbatasan daya dukung bio-geofisik dan lingkungan.
- ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sumberdaya alam dan perkembangan ekonomi luar (pulau induk atau kontinen).
- Kerusakan sumberdaya alam daratan, pesisir, dan lautan.
- Lemahnya pengawasan SDA dan penegakan hukum.



# KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025 (Undang-Undang No.17 Tahun 2007)

## Visi

"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur"



## Misi :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
  2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
  4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
  5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
  6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  - Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. **Pro-Poor**, melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. **Pro-Job**; melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap, dukungan modal dan kepastian berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran
3. **Pro-growth**; melalui pengembangan infrastruktur, industrialisasi, dan modernisasi.
4. **Pro-sustainability**; melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



# RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010-2014

## VISI :

Indonesia Penghasil  
Produk Kelautan  
dan Perikanan  
terbesar 2015



## MISI :

Mensejahterakan  
Masyarakat  
Kelautan dan  
Perikanan



## TUJUAN :

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara terintegrasi
  - Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan
  - Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan
  - Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional

## STRATEGY

1. SDKP dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan

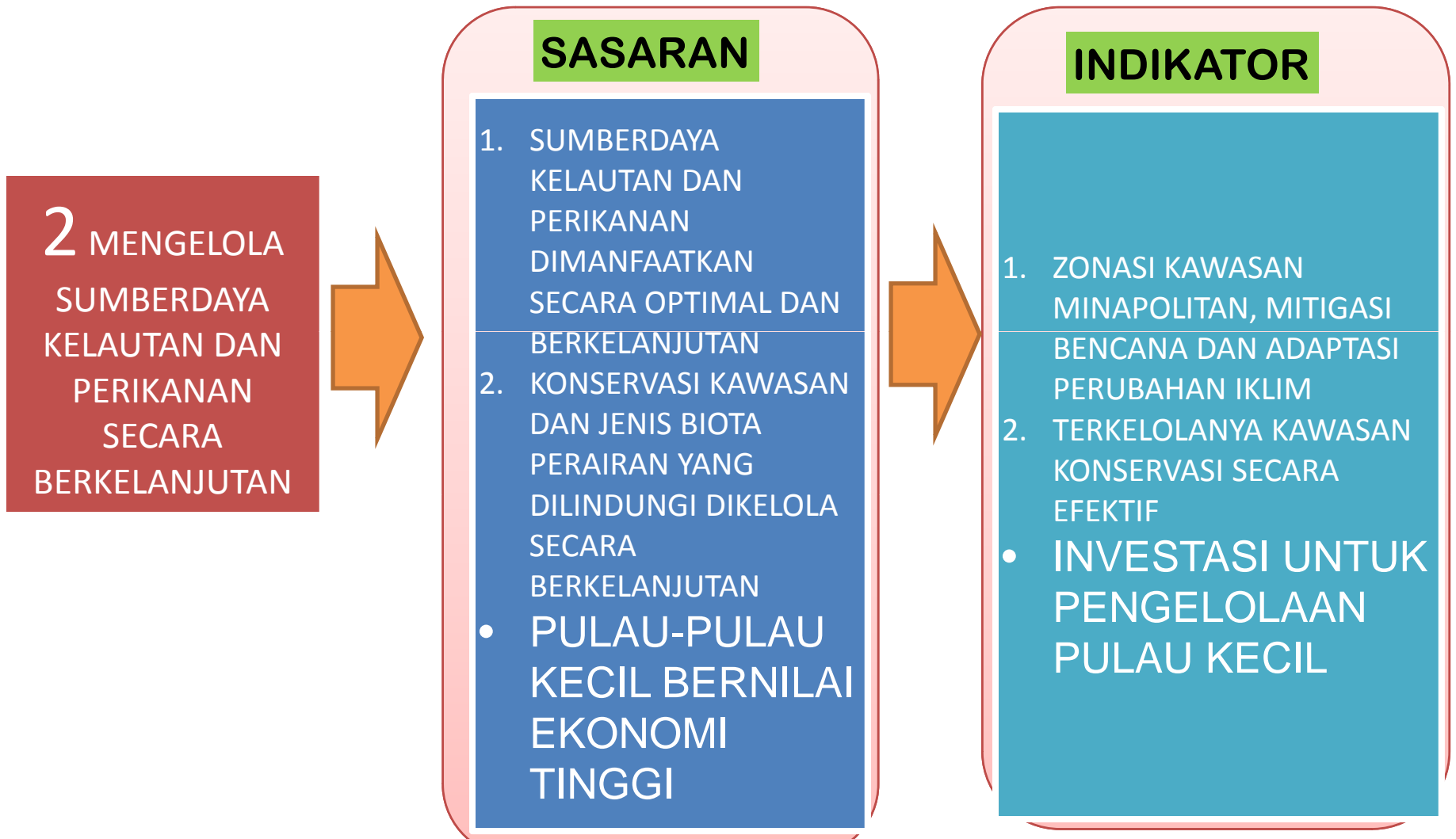
2. Konservasi Kawasan dan Jenis Biota

3. PPK Menjadi Pulau Bernilai Ekonomi Tinggi

4. Indonesia bebas IUU fishing....

# GRAND STRATEGY

## KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2010-2014



# RENCANA STRATEGIS 2010-2014

## DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL

### VISI:

MENJADIKAN PULAU  
KECIL BERNILAI  
EKONOMI TINGGI



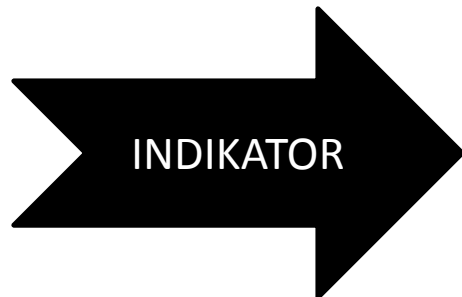
### TUJUAN:

MENDAYAGUNAKAN POTENSI PULAU-PULAU KECIL SECARA  
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN



### SASARAN:

TERCAPAINYA 200 PULAU KECIL YANG DIKELOLA



1. 200 PULAU-PULAU KECIL DAPAT DIPETAKAN POTENSI, DILAKUKAN FASILITASI INFRASTRUKTUR, FASILITASI PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI SERTA ADAPTASI BENCANA
2. 25 PULAU-PULAU KECIL DAPAT DIFASILITASI INVESTASINYA





# TARGET PENDAYAGUNAAN PULAU2 KECIL 2010 - 2014

OUTPUT	TARGET				
	2010	2011	2012	2013	2014
PPK TERIDENTIFIKASI POTENSINYA	20	30	60	60	30
PPK MEMILIKI INFRASTRUKTUR MEMADAI	20	30	30	30	30
PPK MEMILIKI EKOSISTEM YANG BAIK DAN MEMILIKI KESIAPAN TERHADAP BENCANA	20	30	30	30	30
PPK YANG DIFASILITASI KEGIATAN INVESTASI	5	5	5	5	5



# STRATEGI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL



# PENDEKATAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

PULAU-PULAU KECIL

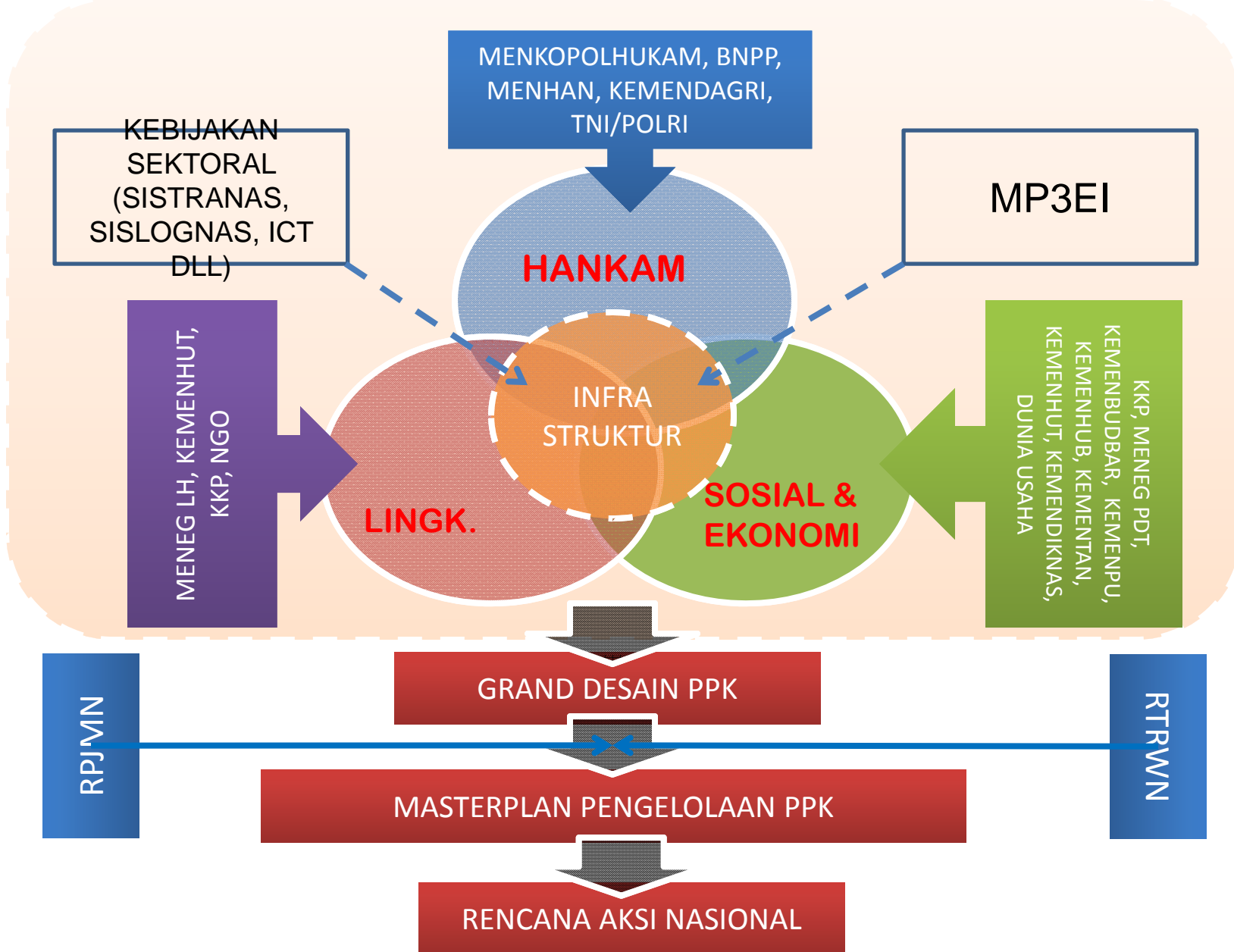
EKOLOGI

EKONOMI

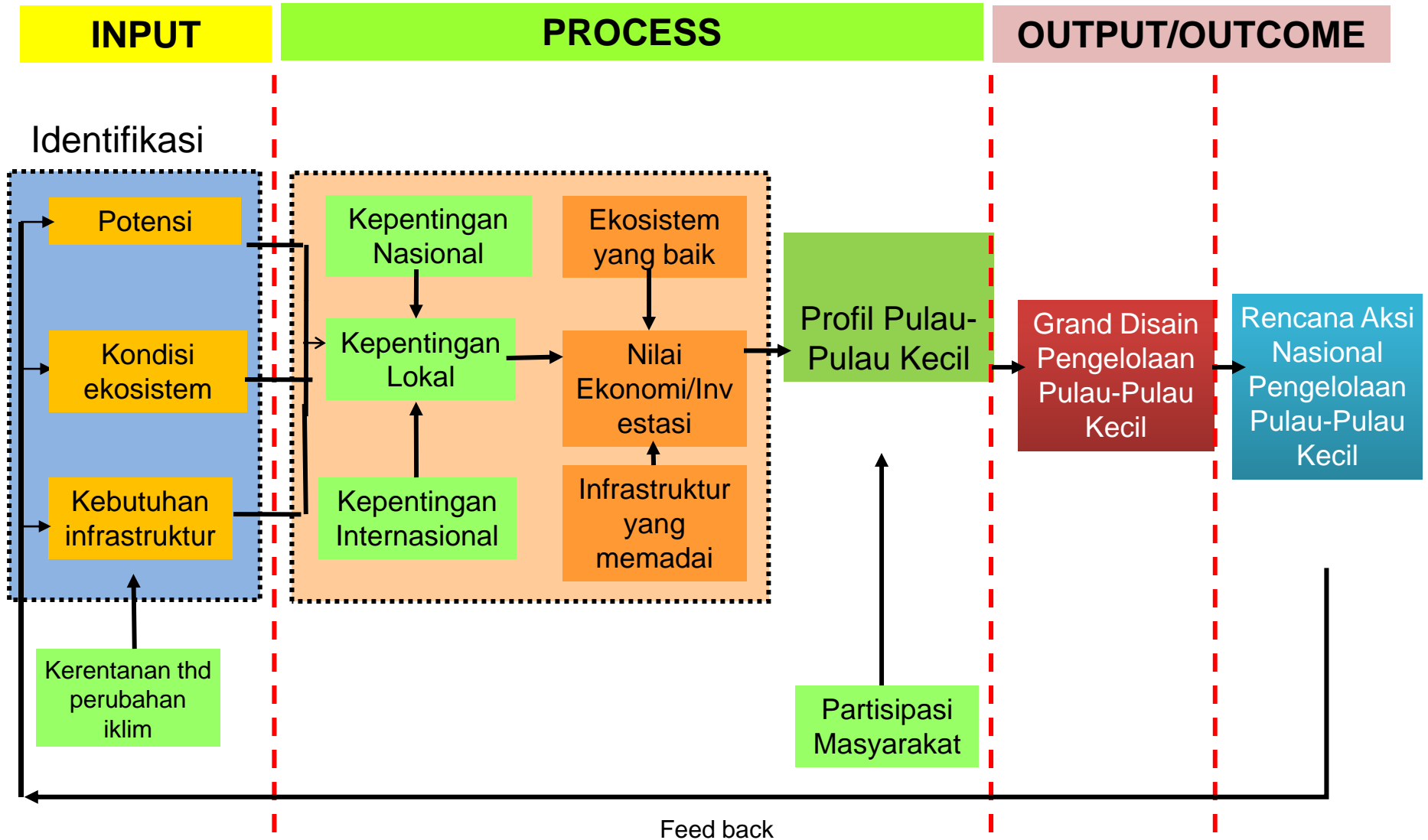
SOSIAL BUDAYA

PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN

# INTEGRATED SMALL ISLANDS MANAGEMENT



# KERANGKA PIKIR PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL



# PRINSIP PENGELOLAAN

- ❑ **Prinsip Co-ownership** (kawasan yang akan dikembangkan : milik bersama, pemanfaatan dan perlindungan dilakukan secara bersama berdasarkan nilai kearifan dan budaya lokal).
- ❑ **Prinsip Cooperation** (pengelolaan dengan prinsip mengatur peranan masing2 yg dilakukan oleh masyarakat stakeholder)
- ❑ **Prinsip Co-responsibility** (pengelolaan dg kegiatan perlindungan dan pembinaan kawasan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, pengusaha dan seluruh stakeholder)
- ❑ **Prinsip Community Based Management (CBM)** Pengelolaan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat setempat



# POLA PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

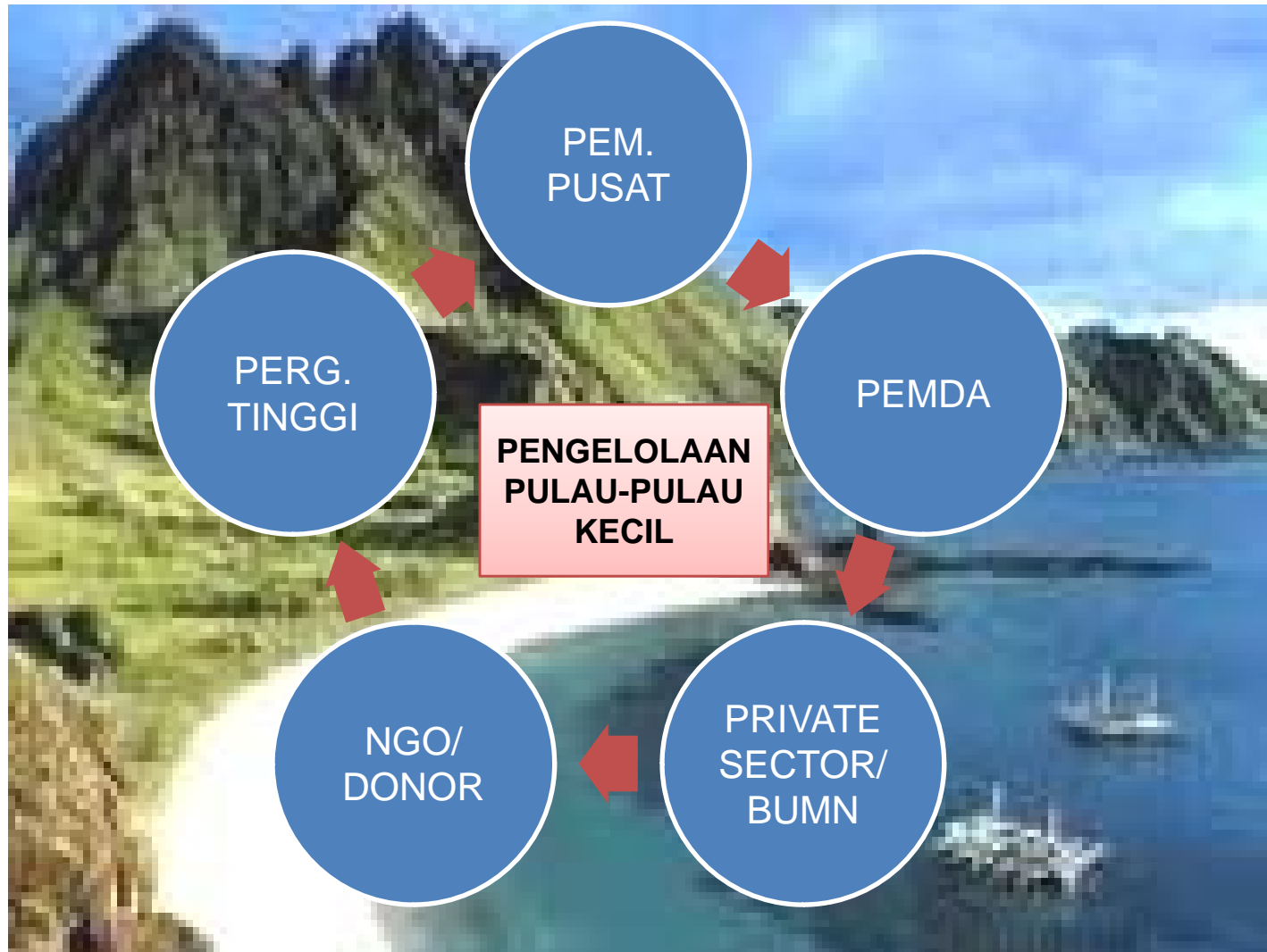
❑ *Government Based Management*, dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dg peraturan perundangan;

❑ *Private Based Management*, dilakukan oleh pihak swasta, tetapi harus sesuai dengan rencana zonasi yg sudah dibuat oleh Pemerintah serta harus memanfaatkan sumberdaya lokal dan melibatkan masyarakat setempat;

❑ *Collaboration Management*, dilakukan atas dasar kerjasama dua pihak atau lebih dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.



# KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL





# Strategy Kebijakan

Kebijakan Green  
Island

Kebijakan Adopsi  
Pulau

Kebijakan  
Pengembangan  
Investasi

# Kebijakan Pengembangan Green Islands



Konsep 3 R : Reduce, Recycle and Reuse



Pemanfaatan sumber air dengan efisien



Pengembangan sumber energi yang terbarukan



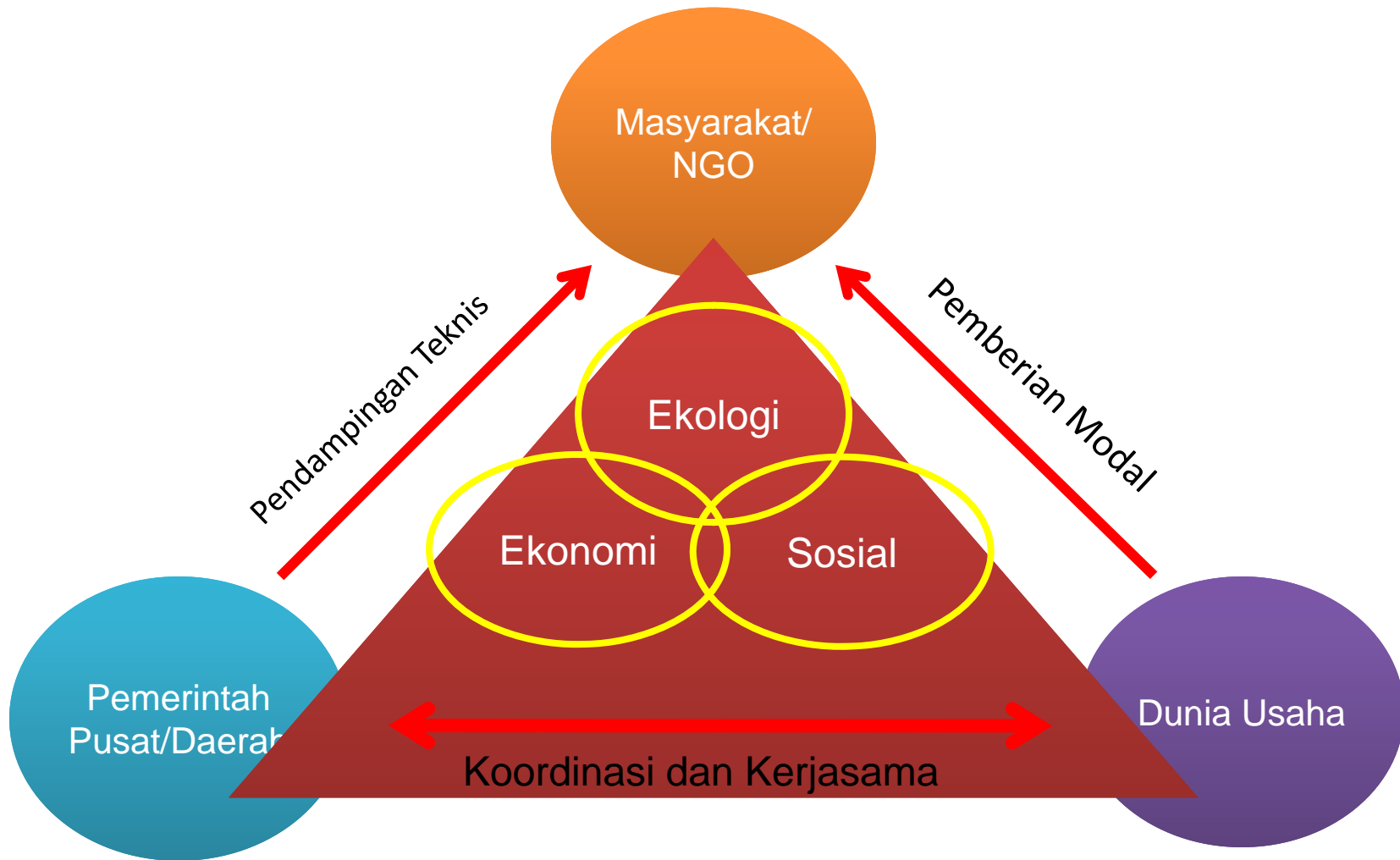
Pengembangan infratsruktur yang ramah lingkungan dan mengadaptasi dampak perubahan iklim



Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, melibatkan masyarakat dan sesuai daya dukung lingk.



# Kebijakan Adopsi Pulau



# Kebijakan Adopsi Pulau

## Program Pokok



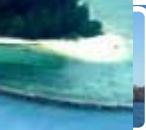
Merumuskan rencana pengelolaan



Meningkatkan pendapatan masyarakat



Meningkatkan fasilitas infrastuktur



Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat



Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat



Mitigas. dan adaptasi bencana dan perubahan iklim



# PENGEMBANGAN INVESTASI PULAU-PULAU KECIL

Kegiatan Utama



Wisata Bahari



Perikanan Berkelanjutan



Budidaya Laut



Pertanian organik



Peternakan

# KRITERIA INVESTASI DI PULAU-PULAU KECIL

- ❖ Menggunakan energi terbarukan
- ❖ Efisien dalam penggunaan air
- ❖ Memanfaatkan potensi lokal
- ❖ Melibatkan masyarakat setempat
- ❖ Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan
- ❖ Mengembangkan komoditi bernilai tambah tinggi





## Beberapa Ilustrasi Pengembangan Investasi di Pulau-Pulau Kecil



# ARAHAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL (Permen KP No. 20/2008)

## **Prioritas :**

- ❖ Konservasi
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan
- ❖ *Penelitian dan Pengembangan*
- ❖ Budidaya Laut
- ❖ Pariwisata
- ❖ Usaha Perikanan Berkelanjutan
- ❖ Pertanian Organik

## **Non Prioritas:**

- ❖ permukiman
- ❖ Industri
- ❖ Permukiman
- ❖ Perkebunan
- ❖ Pertambangan
- ❖ Transportasi
- ❖ Pelabuhan





# PROGRAM AKSI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL



# PROGRAM ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI PULAU-PULAU KECIL

## 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan PPK Berbasis Masyarakat

- Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang sanitasi dan pola hidup bersih dan sehat;
- Pelatihan kader penyuluh kesehatan lingkungan;
- Pelatihan pemrosesan dan penanganan air baku/bersih;
- Identifikasi dan pencegahan penyakit
- Perbaikan sarana/prasarana kebersihan (septictank, SPAL rumah tangga, MCK Umum)

## 2. Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Berbasis

## 3. Sumberdaya Lokal

- Pelatihan keterampilan pengolahan produk perikanan;
- Pelatihan diversifikasi usaha hasil perikanan;



Lanjutan ...

### 3. Pengendalian Pencemaran

- Pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik
- Bimtek daur ulang sampah menjadi kerajinan tangan
- Pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik
- Aksi bersih lingkungan pulau kecil



### 4. Mitigasi dan Adaptasi Bencana

- Sosialisasi kerawanan bencana dan dampak global warming di PPK
- Bimbingan teknis mitigasi dan adaptasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, dll.;
- Peningkatan ketahanan masyarakat di PPK (community resilience)
- Pembangunan struktur pendukung penyelamatan diri, rumah panggung.



Program Rehabilitasi ekosistem pantai melalui penanaman vegetas pantai, seperti: cemara laut, waru laut, ketapang, sukun, dll.

Cemara Laut  
(*Casuarina equisetifolia*)



Ketapang  
(*Terminalia catappa*)



Waru laut  
(*Thespesia populnea*)



Sukun  
(*Artocarpus communis*)

# Program Adopsi Pulau



Mangrove seeding



Location of mangrove rehabilitation



Environment education



Develop alternative livelihood



Mangrove implantation

## Beberapa Lokasi Prioritas Implementasi Program Adopsi Pulau

PULAU	LOKASI	MITRA KERJA	DAYA DUKUNG LINGK	BENTUK PROGRAM
Lepar Island	South Bangka	PT. Timah	Marine tourism, conservation	Community Empowerment, ecosystem rehabilitation
Enggano Island	North Bengkulu	Bank Mandiri	Marine tourism, conservation	Ecosystem rehabilitation, disaster mitigation
Maratua Island	Berau	Berau Coal, Star Energy, Chevron	Marine tourism, conservation	Resort, Infrastructure
Sebatik Island	Nunukan	Adaro	Marine tourism, conservation	Community empowerment, education, alternative livelihood, ecosystem rehabilitation
Siantan Island	Anambas Islands	Conoco Philips	Marine tourism, conservation, marine culture, sustainable fishing	Community empowerment, ecosystem rehabilitation, infrastructure

## CONTINUED...

PULAU	LOKASI	MITRA KERJA	DAYA DUKUNG LINGK	BENTUK PROGRAM
Mansuar Island	Raja Ampat	Niko Resources	Marine tourism, marine culture	Community Empowerment, infrastructure
Samatellu Pedda Island	Pangkep	Exxon Mobil; Bosowa	Marine tourism, conservation	Ecosystem rehabilitation, disaster mitigation, infrastructure
Gangga Island	North Minahasa	Newmonth	Marine tourism, conservation	Community empowerment, Infrastructure
Mantehage Island	North Minahasa	Newmonth	Marine tourism, conservation	Community empowerment, infrastructure
Selayar Island	South Sulawesi	Bosowa	Marine tourism, marine culture, sustainable fishing	Community empowerment, ecosystem rehabilitation, infrastructure

# PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR





# BASIS LEGALITAS PENGELOLAAN PPK TERLUAR

1. UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. UU No.43 Tahun 2008 Tentang Perbatasan Negara
3. PP. No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar
4. Perpres No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Disamping itu
5. Perpres No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
6. Per MKP No. 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya.

# TUGAS TIM KERJA PERPRES 78/2005



1. Melakukan Sosialisasi Perpres No. 78 Tahun 2005
2. Mengkoordinasikan rencana pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
3. Mengkoordinasikan implementasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
5. Menyiapkan rekomendasi rencana dan implementasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
6. Menyiapkan rekomendasi rencana monitoring dan evaluasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

# ARAHAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PP No. 62/2010)

## ❑ Konservasi

## ❑ Kesejahteraan Masyarakat :

- ❖ Industri Jasa Maritim
- ❖ Pendidikan dan Penelitian
- ❖ Wisata Bahari
- ❖ Usaha Perikanan dan Kelautan
- ❖ Pertanian subsisten

## ❑ Pertahanan dan Keamanan



# **ORGANISASI TIM KERJA**

# Laporan pelaksanaan Perpres 78/2005 oleh Tim Kerja I Tahun 2011

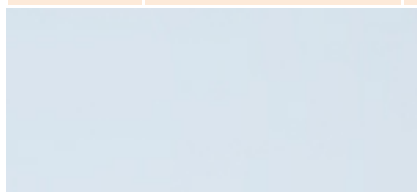
No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
1	Kemeneg. Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan PLTS-SHS 50 WP Tersebar 153 Unit</li> <li>2. Penyediaan PLTS-SHS 50 WP Tersebar 95 unit</li> <li>• Penyediaan PLTS-SHS 50 WP Tersebar 110 unit</li> </ol>	P. Kakorotan, P. Lingian, P. Selaru	
2	Badan Pertanahan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi pulau terluar dalam rangka pengumpulan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) serta data pendukung lainnya</li> </ol>	31 Pulau Terluar	
3	Kemen. PU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pengamananan Pantai Alor</li> <li>2. Perencanaan teknik jembatan , P. Wetar</li> <li>• Penyusunan Detil Desain pantai Alor</li> <li>• Pembangunan Poros Desa dan Saluran P. Kisar</li> </ol>	Alor, Kisar, Wetar, Lirang, Selaru	

## Laporan Tim Kerja I Tahun 2011 (*Lanjutan*)

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
	Kemen. PU (lanjut)	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pembangunan Jalan lingkaran P. Selaru</li> <li>6. Peningkatan struktur jalan Iwaki-Lirang-Wetar</li> <li>7. Pembangunan Penyediaan Air baku di kab. Alor</li> <li>8. OP bendung di p. Alor</li> </ol>	Alor, Kisar, Wetar, Lirang, Selaru	
4	Kemen. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana pelayanan</li> <li>2. Penyediaan dan Peningkatan SDM                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Operasional Kesehatan</li> </ul> </li> </ol>	PPKT di 11 Provinsi dan 21 Kab/Kota	
5	Ditjen Bangda, Kemen-dagri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Data Pengembangan Wilayah</li> <li>2. Fasilitasi Pengembangan wilayah PPK Terpadu                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Implementasi kegiatan</li> </ul> </li> </ol>	PPKT (belum ditentukan)	

## Laporan Tim Kerja I Tahun 2011 (*Lanjutan*)

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
6	Ditjen Hubla, Kemen. Perhubungan	Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di pulau-pulau terluar	P. Sentut, P. Batubawaikang, P. Ararkula, P. Karaweira, P. Penambulai, P. Kulutubai Utara, P. Karang, P. Batu Goyang, P. Sekel, P. dana Sabu, P. Benggala.	
7	Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012</li> <li>2. Monitoring Pelaksanaan DAK SPKP TA. 2011</li> </ol>	<p>38 Kabupaten /Kota Prioritas di Kawasan Perbatasan</p> <p>Beberapa kab di perbatasan kalimantan</p>	



## Laporan Tim Kerja I Tahun 2011 (*Lanjutan*)

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
8	Asisten Operasi onal TNI	Pengamanan pulau, pengamanan menara, patroli darat di kepulauan, patroli di pesisir pantai	Kodam IM : P. Rondo, Kodam I/BB : P. Berhala Nipa, Sekatung, Kodam VII/Wrb : P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, Kodam IX/Udy : P. Batek, P. Dana Rote Kodam XVII/Cen : P. Fani, P. Brass, P. Fanildo	
9	Deputi Operasional POLRI	Pembangunan sarana dan prasarana POLSEK/POS POL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapospol</li> <li>- Rumah dinas tipe 54</li> <li>- Rumah dinas tipe 38</li> </ul>	Pulau Rondo & Jiew	



## Laporan Tim Kerja I Tahun 2011 (*Lanjutan*)

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
10	Badan Intelegen Negara	Pendalaman Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) untuk mengetahui potensi, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap pulau tersebut, baik pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P. Rondo (NAD),</li> <li>2. P. Berhala (Serdang Bedagai, Sumut),</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P. Sekatung (Natuna, Kepri),</li> <li>• P. Dorehkar, Kep. Ayau (Raja Ampat, Papua Barat),</li> <li>• P. Ndana (Rote Ndao, NTT)</li> </ul>	
11	Kemen. Pendidikan Nasional	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar (Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Sekolah)	33 Kabupaten, Tidak spesifik untuk PPKT	

## Laporan Tim Kerja I Tahun 2011 (*Lanjutan*)

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
12	Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan	Menyusun dan membahas anggaran serta menyetujui DIPA Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan semua sektor terkait yang menjadi anggota Tim Kerja I dan II		
13	Kemen Luar Negeri	Memfasilitasi perjanjian batas laut dengan negara tetangga		
14	Kementerian Hukum dan HAM	Memproses perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan PPKT		
15	Sekretariat Kabinet	Memproses perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan PPKT		

# Kegiatan KKP

## dalam Mendukung Perpres 78 TA 2011

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
1	Ditjen KP3K, Dit. PPK	1. Identifikasi potensi PPKT 2. Sinkronisasi Program Pengelolaan PPKT • Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan PPKT	P. Dolangan, P. Salando, P. Karimun Kecil, P. NusakambanganP. Maratua, P. batu Berhanti, P. Nongsa, Simuk	
		4. Fasilitasi Pulau Kecil yang Siap terhadap Bencana	Pulau Nain Besar , Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulut , dengan beberapa peserta berasal dari Pulau Mantehage	
		5. Fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana	P. Lingayan, P. kawaluso, P. Miangas	
		6. Fasilitasi investasi PPK	P. Nipa	

# Kegiatan KKP

## dalam Mendukung Perpres 78 TA 2011

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
	Dit TRLP3K	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyusunan RSWP3K Provinsi Maluku Utara</li> <li>2. Koordinasi perbatasan (Pokja perbatasan) dalam rangka zonasi TRWP3K <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Renstra WP3K</li> </ul> </li> </ol>	Prov. Maluku Utara	
	Dit Pesisir dan Lautan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mitigasi bencana dan Pencemaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Pencemaran Lingkungan di Kota Samarinda</li> </ul> </li> </ol>	Jawa Timur, Kaltim	
	Dit KKJI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan inventarisasi KKP</li> </ul> </li> </ol>	Kaltim, maluku	

# Kegiatan KKP

## dalam Mendukung Perpres 78 TA 2011

No	K/L	Kegiatan	Lokasi PPKT Tahun 2011	Rencana Tahun 2012
2	P2SDKP	1. Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Bakorkamla</li> <li>• Kerjasama Pengawasan Malaysia-Indonesia, Malindo</li> <li>• Kerjasama Pengawasan Malaysia-Indonesia-Australia, Ausindo</li> </ul>	Seluruh PPKT, Perbatasan RI-malaysia, Perbatasan RI-Australia	
3	Ditjen Tangkap	Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)	Dari 100 lokasi PPI terdapat 31 PPI yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Pasifik, L. Cina Selatan dan L. Arafura	

A school of silver fish, possibly a species of surgeonfish, swimming in a dark underwater environment. The fish are illuminated from the side, highlighting their silvery scales and the shape of their bodies. They are swimming in a loose formation over a sandy or rocky seabed.

**TERIMA KASIH**